



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Jalan Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang

☎ 0752-82208

✉ pnpp_ks2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR W3.U10/112/KOT/SK/XII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja, maka dipandang perlu untuk membentuk tim Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. Selain itu, dalam rangka terib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022;
3. bahwa dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG;**

- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang Panjang

Tanggal 24 Desember 2021

Ketua



DADI SURYANDI, S.H.,M.H

Nip. 19790915 200212 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

Nomor : W3.U10/112/KOT/XII/2021

Tanggal : 24 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DADI SURYANDI, S.H.,M.H NIP. 19790915 200212 1 005	Ketua	Pembina
2	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001	Wakil Ketua	Pengarah
3	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003	Panitera	Ketua
4	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006	Sekretaris	Wakil Ketua
5	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
6	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 198308112008052001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
11	SURYA DHARMA, S.H NIP. 19851130 201212 1 001	Analisis Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di Padang Panjang

Tanggal 24 Desember 2021

Ketua



DADI SURYANDI, S.H.,M.H
Nip. 19790915 200212 1 005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan - Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasai - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = banding, kasasi, dan PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Indek Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100% Catatan :	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah perkara diPutus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100% Catatan : Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat = putusan perkara tipikor	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Panitera